

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Migrasi merupakan fenomena yang paling berpengaruh dalam pembangunan peradaban di dunia. Migrasi membentuk komunitas yang besar dan menjadikan persilangan antar budaya, memahami perbedaan, membentuk sebuah keragaman dan terbentuknya komunitas yang baru. Banyak penyebab terjadinya migrasi, salah satu contohnya adalah migrasi yang terjadi akibat perang (Affairs, 2016).

Pada awal tahun 2010, negara-negara di Mediterania Selatan, negara yang secara geografis terletak di Afrika Utara dan kawasan Timur Tengah menghadapi konflik politik. Konflik yang awalnya terjadi di Tunisia kemudian menjadi titik awal terjadinya konflik di negara-negara sekitar seperti Mesir, Libya, dan Suriah (Sari, 2015).

Kondisi perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah yaitu Perang Teluk pada tahun 1990 yang terjadi antara Irak yang mau menginvasi negara Kuwait, selain itu intervensi pihak Amerika Serikat atas perang tersebut dengan isu terorisme hingga fenomena *Arab Spring*, dimana pemberontakan yang terjadi di belahan Timur Tengah untuk menggulingkan rezim pemerintah. Gerakan radikal yang mengatas-namakan Agama membuat resah di wilayah Timur Tengah menyebabkan munculnya banyak korban dan mengakibatkan terjadinya migrasi ke suatu wilayah yang aman dari konflik tersebut. Tujuan utama mereka adalah negara-negara di benua Eropa, karena mudahnya jalur untuk wilayah yang dituju dan reputasi baik negara-negara tujuan seperti Jerman, Perancis, Inggris (Malone, 2013).

Dengan begitu banyaknya perang yang terjadi serta adanya ketidakamanan sebagai penguksi, ada sejumlah besar kejadian migrasi yang terjadi dalam rangka untuk mencari hidup yang lebih bagi mereka dan keluarga mereka. Terdapat begitu banyak bangsa-bangsa yang berbeda dalam arus migran yang mencoba memasuki Eropa (Commons, 2017).

Akan tetapi bagi Negara yang dituju tersebut mempunyai sisi yang berbeda dalam menanggapi fenomena tersebut karena negara-negara tersebut tidak semerta-merta dapat menerima para imigran untuk masuk ke wilayahnya. Kedatangan para penguksi Di Uni Eropa mendapatkan bermacam-macam tanggapan dari negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa terdiri dari 28 negara tersebut memiliki peraturan penguksi yang berbeda. Sehingga perlakuan dan cara penerimaan para penguksi di setiap negara Uni Eropa itupun berbeda (Sari, 2015). Seperti yang terjadi pada para penguksi di wilayah Calais, Prancis dimana para penguksi yang ingin mengarah ke Inggris mengalami penolakan pemerintah Inggris.

Calais adalah daerah yang terletak diantara perbatasan Prancis dan Inggris dan merupakan gerbang utama untuk masuk ke Inggris. Calais, kota pesisir dan tempat utama yang menghubungkan pulau-pulau Inggris dengan benua Eropa, telah melihat menjadi tempat bagi orang-orang asing untuk datang jauh sebelum perkembangan migrasi baru-baru ini. Apa yang membedakan para migran ini dengan kebanyakan orang asing lainnya di Calais adalah tempat asal mereka, serta niat mereka. Sementara banyak pelancong di Calais berasal dari E.U. negara (dan dengan demikian diizinkan masuk relatif mudah), para migran ini datang dari jauh (Nuland, 2011). Terletak di utara Prancis, wilayah ini

menjadi penghubung antara kedua negara tersebut dengan jalur pelabuhan dan *subway* yang menjadi satu-satunya wilayah di Eropa untuk menyebrang ke Inggris. Di wilayah dekat tempat tersebut berdiri pemukiman ilegal yang dibuat oleh para pengungsi yang menunggu untuk masuk ke wilayah yang dituju. Tempat ini lalu dijuluki dengan *La Jungle*.

La Jungle ini bermula ketika para pengungsi dari perang teluk tiba di Calais. Mereka tersebar di sepanjang kota lalu pada tahun 1999 palang merah perancis mendirikan tenda yang juga diakui dari UNHCR sebagai pusat bermukimnya pengungsi, Pemukiman tersebut merupakan dekat dengan jalur pelabuhan dan channel kereta kearah inggris, akan tetapi pada tahun 2001 terjadi kekacauan dimana para pengungsi memaksa untuk masuk pelabuhan dan terjadi korban. Walaupun sudah dihancurkan berulang kali oleh otoritas Prancis, ribuan pengungsi tetap tinggal di Calais dan secara berulang kali mencoba memasuki Inggris (UNHCR, Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries, 2015). Pemerintah Perancis lalu menutup tempat tersebut, pada tahun 2005 para pengungsi mendirikan tersebut akan tetapi sempat dibubarkan lagi oleh pemerintah perancis (Jessica Reinisich, 2015).

Hingga pada tahun 2009 Pemukiman ini dibangun kembali. Pemukiman ini tersebar di sekitar wilayah perbatasan Calais yaitu jalur penyebrangan. Tujuan pengungsi untuk mencari tempat di Inggris, sebab mereka menduga bahwa pemerintah Inggris menjaga mereka dengan baik, jaminan hidup serta kesamaan bahasa yang sehari-hari mereka gunakan (Nuland, 2011).

Kondisi di kamp ini umumnya terdiri bangunan semi permanen. Tersebar di beberapa tempat sepanjang dekat

dengan pelabuhan dan jalur penyeberangan akibat dampak dari kebijakan Inggris yang menolak masuknya para pengungsi, membuat mereka terlantar di Calais. Hal ini menimbulkan masalah baru, dimana para pengungsi tersebut mendirikan pemukiman liar di wilayah tersebut dan mencari celah untuk masuk ke Inggris dimulai dari menerobos pagar pembatas, menumpang dari orang-orang yang pergi ke Inggris secara paksa (Rahman-Jones, 2016).

Hal ini sudah terjadi sejak tahun 1990 hingga akhir tahun 2016, para pengungsi yang masuk mendirikan pemukiman yang bersifat semi-permanen dimana pemukiman ini sempat digusur akan tetapi pemukiman ini tetap didirikan lagi oleh mereka setelah penggusuran, disisi lain pemukiman ini memunculkan masalah sosial yang baru di wilayah tersebut seperti aksi anarkis, tingginya kriminalitas dan terjadinya bentrok antara Kepolisian setempat (Rahman-Jones, 2016). Dilansir pada laporan *Refugees Right Data Project* hingga tahun 2016 para pengungsi berjumlah kurang lebih 5000 orang.

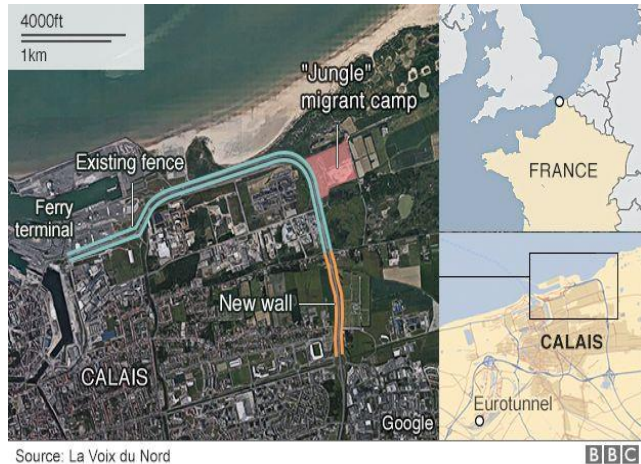
UE secara kolektif telah mengambil sejumlah langkah berbeda untuk mencoba mengatasi krisis migrasi, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya untuk melindungi perbatasannya dan secara tepat memantau dan memproses orang-orang yang memasuki Negara-negara Anggota UE. UE juga telah berusaha merespons krisis pengungsi (Commons, 2017)

Daya tarik Inggris sebagai tujuan bagi pengungsi dan migran telah menciptakan tantangan khusus, termasuk yang dihadirkan oleh orang-orang yang berkumpul di Calais dan pelabuhan Saluran lainnya yang berharap menemukan cara untuk menyeberang ke negara ini. Pemerintah telah mengatakan bahwa mereka akan mengambil pendekatan komprehensif untuk masalah saat ini seputar migrasi. Ini termasuk mengatasi alasan orang

bermigrasi, dan pengalaman mereka selama transit, di perbatasan eksternal UE, perbatasan Inggris dan ketika mereka tiba di Inggris (Commons, 2017)

Inggris merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian Dengan UNCHR yaitu *Convention Relating to The Refugees (1951)*. Isi perjanjian menerangkan bahwa sekelompok atau individu yang telah diberikan gelar sebagai pengungsi wajib untuk dilindungi tanpa memandang ras, bangsa, maupun agama. Namun demikian Inggris tetap mengeluarkan kebijakan yang menolak pengungsi di Calais.

Pada masa pemerintahan Theresa May, ia mempunyai kebijakan untuk mengurangi masuknya imigran ke dalam Inggris tercantum dalam buku manifesto konservatif yang berisi tentang kebijakan yang akan dilakukan ketika Theresa May menjadi Perdana Menteri (Party, 2017). Salah satu kebijakannya adalah perpanjangan kontrak dengan dengan Prancis yang bernama *le touquet agreement* yakni mempunyai hak untuk mengatur di sebagian wilayah negara yang disepakati perjanjian tersebut dengan kata lain Inggris memperluas perbatasannya sebaliknya Inggris juga memberikan dana kepada perancis dalam menangani wilayah Calais yaitu berupa keamanan dan akomodasi di tempat tersebut. Pada tahun 2015 perdana Menteri David Cameron memberikan dana sebesar 12 juta poundsterling atau sekitar 232 milyar rupiah. Kegunaan Dana tersebut membangun Tembok besar antara pemukiman dengan jalur penyebrangan,



Denah Lokasi Camp Pengungsi Calais

Terkait dengan para pengungsi dengan adanya kebijakan tersebut membuat para imigran khususnya pengungsi mempunyai hambatan dalam memasuki wilayah Inggris. Dalam hal lainnya, Inggris telah meratifikasi perjanjian dengan UNCHR yaitu *Convention Relating to The Refugees (1951)*. Isi perjanjian menerangkan bahwa sekelompok atau individu yang telah diberikan gelar sebagai pengungsi wajib untuk dilindungi tanpa memandang ras, bangsa, maupun agama. Walaupun mereka telah meratifikasi perjanjian tersebut tetapi kebijakan mereka buat yang menolak pengungsi di Calais mereka tetap dilakukan.

Atas fenomena ini, peneliti ingin meneliti masalah tersebut untuk menemukan bagaimana sebuah negara memproses fenomena yang terjadi dalam perumusan kebijakan yang diambilnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Mengapa Inggris pada masa pemerintahan Theresa May menolak Pengungsi di Calais untuk masuk ke wilayah Inggris?

C. Kerangka Teoritik

Teori Sistem Politik David Easton

Teori yang dipakai penulis untuk meneliti objek penelitian menggunakan teori sistem politik yang dibuat oleh David Easton. Sistem Politik merupakan kebijakan terbentuk atas alokasi kondisi dan nilai didalam masyarakat. Dalam prosesnya aktor melihat dari kedua belah pihak yaitu berupa Input dan output (Easton, 1957).

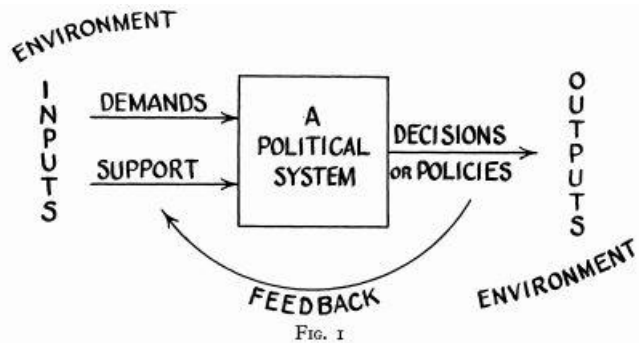


FIG. 1

Bagan Teori David Easton

Di dalam Input adalah faktor yang mempengaruhi berasal dari dalam aktor Terdiri dari permintaan dan dukungan, permintaan merupakan tuntutan dari masyarakat, bentuk tuntutan sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu, keamanan,

Kesejahteraan, dan Lingkungan sosial yang berada didalamnya.

Dukungan merupakan alat yang menunjang untuk tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai, mempunyai banyak bentuk berupa norma yang berlaku didalamnya, ideologi suatu bangsa, kelompok kepentingan serta lembaga pemerintah yang mendukung terbentuknya kebijakan atas kedua pihak tersebut diproses.

Di sisi yang lain, output dapat dilihat dari reaksi yang berlaku baik lingkungan didalam maupun diluar negara itu sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut , yaitu berupa tekanan dan reaksi dari pihak luar seperti Organisasi internasional atau non pemerintah, tanggapan negara lain adalah contoh aktor yang berpengaruh pada sisi output. Dengan hadirnya mereka membentuk *feedback* atau acuan yang menimbulkan aktor dapat mengevaluasi ulang yang terbentuknya siklus (Easton, 1957). Ada dua macam input sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan.

1. Tuntutan

Kebijakan terbentuk karena tuntutan-tuntutan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan memuaskan. Bila tuntutan-tuntutan atau kehendak-kehendak itu disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat maka tuntutan-tuntutan itu telah menjadi input-input bagi sistem politik. (Mas'ood & MacAndrews, 1997:8)

Tuntutan timbul dari dua sumber yaitu tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Tuntutan

eksternal artinya tuntutan yang berasal dari lingkungan di luar sistem politik, yaitu bisa dari sistem budaya, ekologi, ekonomi, kepribadian, dan lain sebagainya. Lingkungan ini akan membantu atau mempengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk ke dalam sistem politik. Misalkan, sistem budaya memberikan perilaku yang berbeda-beda pada tiap masyarakat dalam membentuk tujuan-tujuan umum maupun khusus mereka dan prosedur-prosedur yang oleh mereka dianggap harus diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Beberapa kebudayaan menekankan segi kebutuhan ekonomi, kebebasan individu, dan efisiensi rasional. Beberapa kebudayaan lain menekankan pemeliharaan harmoni, walaupun proses pencapaian tujuan ini berarti mengorbankan tujuan efisiensi dan rasionalitas. Beberapa lagi yang lain menekankan tujuan mencari kekuasaan dan prestise.

Tuntutan internal berarti tuntutan yang berasal dari sistem politik itu sendiri. Dalam setiap sistem yang berjalan, secara khas tuntutan-tuntutan bisa timbul dengan tujuan merubah hubungan-hubungan politis diantara anggota-anggota itu sendiri, sebagai akibat dari ketidakpuasan atas hubungan-hubungan itu. Misalnya, dalam suatu sistem politik berdasarkan perwakilan, dimana perwakilan setara merupakan norma politik yang penting, mungkin timbul tuntutan-tuntutan menyeimbangkan perwakilan diantara distrik-distrik pemilihan kota dan desa. Juga tuntutan-tuntutan untuk merubah proses pengangkatan pemimpin-pemimpin politik formal, perubahan cara amandemen konstitusi, dan tuntutan lain serupa.

Tuntutan internal ini bukanlah input yang dimasukkan ke dalam sistem itu tetapi merupakan sesuatu yang timbul di dalam sistem itu sendiri (withinput). Apabila dibandingkan dengan tuntutan eksternal, konsekuensi-konsekuensi dari input internal ini terhadap sistem politik lebih langsung daripada yang ditimbulkan oleh tuntutan eksternal.

Tidak semua tuntutan menjadi issue politik. Banyak tuntutan-tuntutan yang mati karena hanya didukung oleh golongan masyarakat yang kurang berpengaruh dan tidak pernah bisa masuk ke dalam tingkat pembuatan keputusan. Jadi issue adalah suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk dibahas melalui saluran-saluran yang diakui dalam sistem itu. (Mas'ood & MacAndrews, 1997)

2. Dukungan

Input-input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Sistem itu juga perlu energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangai suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Inilah yang disebut dukungan, dan tanpa hal ini tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan.

Tingkah laku mendukung ada dua macam, yaitu berujud tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain. Yang kedua adalah memberikan suara yang mendukung pencalonan seorang pemimpin dalam pemilihan umum, atau membela atau

mempertahankan suatu keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

Dukungan juga bisa diberikan tanpa berujud tindakan atau berbentuk tingkah laku batiniah/pemikiran. Artinya suasana batiniah yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap-sikap atau kecenderungan-kecenderungan yang kuat, atau kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Hal ini terkesan dari kesetiaan seseorang pada suatu partai politik, terikat pada demokrasi, atau bersemangat patriotis.

Dukungan yang masuk ke dalam sistem politik diarahkan pada tiga wilayah, yaitu komunitas politik, rejim, dan pemerintah.

a. Komunitas politik

Suatu sistem politik tidak dapat melangsungkan kerjanya kalau anggota-anggotanya tidak bersedia mendukung eksistensi suatu kelompok yang berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan atau mendorong pembuatan keputusan-keputusan melalui tindakan-tindakan bersama secara damai. Hal ini sering disebut sebagai kesatuan nasional.

b. Rejim

Rejim terdiri dari semua pengaturan yang mengatur cara menangani tuntutan yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut dan cara melaksanakan keputusan. Ini bisa juga disebut “aturan main” yang dipakai oleh sebagian besar anggota sistem tersebut sebagai ukuran untuk menilai sah tidaknya tindakan anggota-anggota sistem.

c. Pemerintah

Pemerintah bisa memperoleh dukungan baik dengan cara-cara persuasive atau pun penggunaan kekuatan kekerasan. Namun sudah menjadi aksioma dalam ilmu politik bahwa pemerintah yang mengandalkan dukungannya dari penggunaan ancaman kekerasan tidak akan berlangsung lama.

Suatu sistem politik tidak akan mampu mengubah tuntutan-tuntutan yang masuk menjadi suatu kebijakan jika tidak bisa menjaga aliran dukungan. Oleh karena itu, sistem politik perlu adanya mekanisme untuk melakukan pengelolaan dukungan.

Ada dua mekanisme yang bisa dijalankan oleh sistem politik, yaitu: output-output dan politisasi.

1. Output

Salah satu cara utama untuk memperkuat ikatan antara anggota-anggota dengan sistem mereka adalah dengan menciptakan atau memberikan keputusan-keputusan yang bisa memenuhi tuntutan-tuntutan sehari-hari dari anggota-anggotanya itu. Tanpa pemenuhan sedikit pun terhadap tuntutan-tuntutan yang ada jelas akan mengendorkan kegiatan dari semua anggota sistem kecuali mungkin yang memiliki semangat patriotik yang fanatik.

Namun demikian tidak bisa suatu sistem politik mempunyai kemampuan untuk menjawab semua tuntutan. Oleh karena itu diperlukan "cadangan dukungan". Di masyarakat barat, cadangan dukungan ini berupa loyalitas terhadap partai politik pendukung pemerintah.

2. Politisasi

Dalam hal ini sistem politik melakukan pendidikan politik untuk mengkomunikasikan dan menanamkan berbagai jenis tujuan dan norma terlembaga dari masyarakat. Politisasi adalah suatu upaya untuk menciptakan dan mengakumulasi suatu sumber atau cadangan dukungan yang besar.

Di dalam Input terdapat faktor yang mempengaruhi berasal dari dalam aktor Terdiri dari permintaan dan dukungan, permintaan merupakan tuntutan dari masyarakat, bentuk tuntutan sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu, keamanan, Kesejahteraan, dan Lingkungan sosial yang berada didalamnya.

Dukungan merupakan alat yang menunjang untuk tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai, mempunyai banyak bentuk berupa norma yang berlaku didalamnya, ideologi suatu bangsa, kelompok kepentingan serta lembaga pemerintah yang mendukung terbentuknya kebijakan atas kedua pihak tersebut diproses.

Di sisi yang lain, output dapat dilihat dari reaksi yang berlaku baik lingkungan didalam maupun diluar negara itu sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut , yaitu berupa tekanan dan reaksi dari pihak luar seperti Organisasi internasional atau non pemerintah, tanggapan negara lain adalah contoh aktor yang berpengaruh pada sisi output. Dengan hadirnya mereka membentuk *feedback* atau acuan yang menimbulkan aktor dapat mengevaluasi ulang yang terbentuknya siklus (Easton, 1957).

Pada pelaksanaannya, dalam proses pembuatan keputusan dengan adanya tujuan yang sama pada tuntutan dan dukungan (*Demands and Supports*). Proses tersebut lalu dilaksanakan pada

Pelaksana, Pelaksana sendiri yaitu sistem politik yang berlaku di Inggris sebagai proses untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan tersebut.

Dikutip dari salah satu pakar sistem politik yang berkaitan dengan teori yang dibuat oleh David Easton yaitu Gabriel Almond. Menurut Gabriel Almond, Sistem Politik merupakan sistem dimana baik masyarakat dan Lembaga-lembaga politik saling berinteraksi satu sama lain untuk terciptanya satu tujuan yang diinginkan. Integrasi merupakan salah satu tujuan dari sistem politik yaitu saling mengikat satu sama lain.

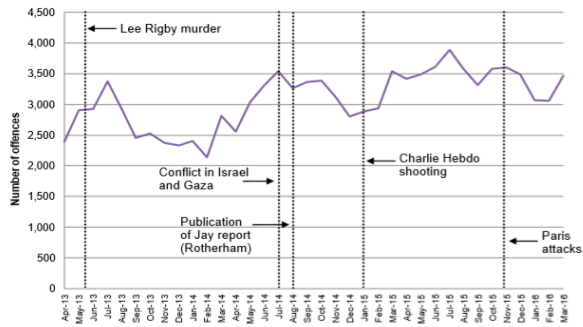
Proses ini kemudian dikonversi yang membentuk sebuah *output*. Pada masa konversi tuntutan yang telah diajukan kemudian di proses kedalam badan legislatif. Inggris dalam sistem pemerintahannya menganut sistem 2 kamar. Dimana Lembaga ini yang berperan dalam mengeluarkan dan mengawasi jalannya kebijakan. Lembaga ini yaitu *House of Commons and House of Lords*. House of common merupakan dewan permusyawaratan rakyat yang dimana anggota dipilih langsung oleh masyarakat akan tetapi para bangsawan tidak dapat ikut menjadi anggota *House Of Commons*. Anggota *House of Commons* terdiri dari 650 anggota dimana partai Konservatif menjadi anggota mayoritas yaitu sebanyak 316 orang selanjutnya yang kedua merupakan partai Buruh sebanyak 259 orang, selanjutnya merupakan partai nasional skotlandia sebanyak 35 orang, partai demokrat liberal sebanyak 12 orang, Sinn Féin sebanyak 6 orang, Plaid Cymru 4 orang, dan green party 1 orang dan independent 5 orang.

Sebaliknya, House of Lords merupakan Dewan Bangsawan, Yaitu Lembaga ini tidak dapat ditunjuk oleh masyarakat umumnya akan tetapi oleh ditunjuk oleh kerajaan dan juga keturunan-keturunan bangsawan. Orang-orang didalamnya juga berpartisipasi dalam partai politik. Dimana partai konservatif menjadi pihak mayoritas didalamnya setelah itu partai buruh yang kedua setelah partai tersebut.

Kedua Lembaga ini saling mempengaruhi dalam membentuk kebijakan akan tetapi dalam prosesnya berbeda. *House of Commons* mempunyai peran membentuk mengatur dan memutuskan sebuah kebijakan yang baru. pemerintah menanggapi isu yang berkaitan dengan input tersebut. Input tersebut lalu dibawa ke meja perundingan di *House of Commons* untuk dirundingkan.

Dalam kasus Inggris, Masyarakat menuntut untuk penolakan pengungsi Calais ke Inggris sebab masalah keamanan. Sebab pada tanggal 7 Januari 2015 terjadi serangan teroris di Perancis yaitu tragedi Charlie Hebdo. Tragedi ini menimbulkan gelombang Islamophobia dan juga Xenophobia di wilayah Eropa salah satunya yang terdekat dengan Perancis adalah Inggris. Kasus *Hate Crimes* di Inggris meningkat pasca kejadian tersebut. Dilansir dari laporan pemerintah tentang *Hate Crimes* yang terjadi di Inggris, mengalami eskalasi pada bulan Januari hingga bulan November 2015 (Home Office, 2016).

Figure 2.1: Number of racially or religiously aggravated offences recorded by the police by month, April 2013 to March 2016



Source: Police recorded crime, Home Office

Gambar : Timeline Terorisme di Eropa

Masyarakat menduga dengan masuknya pengungsi menimbulkan masalah baru yaitu berupa terror serupa yang terjadi di Perancis, selain itu akan terjadi kesenjangan sosial apabila mereka masuk. Menanggapi tuntutan ini pemerintah membuat kebijakan yaitu dimana pada masa pemerintahan Theresa May salah satunya memperpanjang perjanjian *le touquet Agreement* oleh perancis yang dimana masa sebelumnya telah disepakati. Inggris mempunyai hak untuk mengatur di sebagian wilayah negara yang disepakati perjanjian tersebut. Akibatnya pemerintah inggris membuat tembok didekat camp *La jungle*. Selain memberi dana untuk memperketat keamanan. Disisi lain Theresa May merupakan partai konservatif memimpin di Inggris membuat pula kebijakan Menentang segala bentuk Ekstrimisme ataupun Terorisme yang tercantum di Manifesto partai Konservatif 2017 (Party, 2017).

Theresa May sebelumnya pernah menjabat sekretaris negara pada masa pemerintahan perdana

Menteri David Cameron yang merupakan diposisi partai yang sama yaitu Partai konservatif. Pada perannya sebagai sekretaris negara, Theresa May telah menjadi penanggung jawab dalam perjanjian yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis dalam menjaga perbatasan di wilayah Calais pada tanggal 20 Agustus 2015 (Ministère de l'Intérieur , 2015) Perjanjian ini merupakan awal mula didirikannya tembok perbatasan Calais dengan pemukiman Pengungsi *La Jungle*. Pada masa jabatan ini juga kedua belah pihak baik perdana Menteri David Cameron dan juga partai konservatif berupaya menolak dengan pengungsi Calais. Komunikasi politik ini kemudian dilanjutkan ketika pada masa pemerintahan Theresa May menjadi perdana Menteri.

Pihak yang mendukung untuk terciptanya kebijakan yang menolak oleh pengungsi di Calais berkumpul bersamaan dengan pihak yang oposisi. Pihak oposisi merupakan partai diluar partai konservatif berperan dalam mengkritisi kebijakan yang akan diambil selain itu menawarkan solusi yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat. Proses ini dapat dilihat pada laporan Hansard dari parlemen UK. Hansard merupakan metode dokumentasi verba yang terjadi di persidangan. Metode ini digunakan untuk melihat proses jalannya persidangan. sebagai alat evaluasi pemerintah atas sebuah kebijakan serta proses untuk membentuk kebijakan baru. Atau juga sebagai bentuk laporan kepada masyarakat. Selain itu Disamping prosesnya, *House of Lord* berfungsi sebagai hal yang mengkritisi rangkaian kebijakan yang akan dibuat akan tetapi memberikan solusi masalah dalam

rangkaian kebijakan yang mau dirumuskan, selain itu memperdebatkan isu-isu yang terjadi dimasyarakat dan mempengaruhi negara.

D. Hipotesis

Dari teori di atas penulis dapat memberikan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang dikemukakan, alasan Inggris menolak imigran di Calais adalah besarnya tuntutan masyarakat untuk menolak pengungsi karena akan mengancam keamanan negara.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan pemerintah Inggris di bawah PM Theresa May menolak pengungsi di Calais.

F. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi Kajian pada Dampak Kebijakan Pemerintah Inggris terhadap Imigran di Calais pada masa pemerintahan Theresa May. Yaitu ketika intensitas konflik pada puncaknya, yaitu dimana pemerintah Inggris mulai membangun tembok di Calais untuk menahan imigran masuk ke wilayahnya. Pada tahun 2016 Inggris bekerja sama pada pemerintah Perancis untuk menahan pengungsi masuk ke

wilayahnya dan hingga sekarang ketika masa pemerintahan Theresa may berlangsung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi ilmiah, laporan media, artikel-artikel resmi pemerintah dan laporan lembaga-lembaga internasional mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode Eksplanatif yaitu menjelaskan proses terjadinya fenomena tersebut berdasarkan hal-hal yang terkait dengan fenomena tersebut yakni berupa fakta yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis merencanakan ke dalam beberapa bab guna untuk mempermudah penyusunan bahasan dan uraian-uraian.

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II Tanggapan Pemerintah Inggris terhadap pengungsi

Pada Bab III Menguraikan tentang kondisi pengungsi di Calais

Pada Bab IV Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menolak pengungsi dikarenakan aspek keamanan.

Pada Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya.